

---

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU  
(AUTS/K)  
(STUDI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN  
DAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TUBAN)

Dzikri Syaraful Anam  
[dzikri.syaraful.anam-2014@fisip.unair.ac.id](mailto:dzikri.syaraful.anam-2014@fisip.unair.ac.id), [dzikri.syaraful@gmail.com](mailto:dzikri.syaraful@gmail.com)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the program implementation of Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) in Department of Animal Husbandry and Animal Health Lamongan District and Department of Fisheries and Animal Husbandry Tuban District. While the problem that want to be answered is “How to evaluate the implementation of program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) based on Decree of Minister of Agriculture 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 at the Department of Animal Husbandry and Animal Health Lamongan District and Department of Fisheries and Animal Husbandry Tuban District?”

This research uses a qualitative method with the type of descriptive research with focuses on the output of the program. While the techniques of collecting data is done by observation, study documents, as well as indepth interview with informants. Determination of informants conducted with purposive sampling technique. Then to ensure the validity of the data in this research uses the technique of triangulation. Furthermore, the data analysis technique that is by way of data reduction, data presentation and conclusion.

The results obtained from this research indicate that the implementation process of AUTS / K program at the Department of Animal Husbandry and Animal Health Lamongan District is categorized successfully because the output produced in accordance with the program objectives. While the process of implementation of AUTS / K program at the Department of Fisheries and Animal Husbandry Tuban District is categorized as unsuccessful due to not achieving the appropriate output with program objectives.

Keywords: Public Policy, Implementation Evaluation, Program of Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

---

PENDAHULUAN

Usaha di bidang peternakan memiliki bermacam resiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri, yang diantaranya diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam dan juga wabah penyakit. Dalam usaha peternakan, jika peternak tidak bisa mencegah atau menghadapi resiko yang ada maka usahanya bisa berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 yang berisi tentang pedoman alokasi kegiatan berupa fasilitasi model asuransi yaitu Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko dalam usaha peternakan dan sekaligus juga melindungi kreditur atas komoditas yang dibiayai. <http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/1164/pentingnya-asuransi-usaha-ternak-sapi-auts> Tujuannya untuk mengalihkan resiko kerugian dan atau kehilangan sapi kepada pihak ketiga yaitu melalui skema pertanggungansan asuransi dan sasarannya adalah

terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha. Kementerian Pertanian memberikan bentuk kebijakan asuransi ini dengan cara pembayaran premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

Regulasi yang menjadi dasar terbitnya peraturan tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau adalah UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Peternak. Undang-undang tersebut menjadi dasar karena didalamnya (pasal 37, pasal 38, dan pasal 39) dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan dalam upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, maupun perubahan alam yang tidak pasti. Pemerintah kemudian menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang isinya adalah penjelasan mengenai penyediaan fasilitasi asuransi untuk petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan atau peternakan. Kemudian untuk mengatur tentang pelaksanaan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau maka

ditetapkanlah peraturan yang berisi pedoman tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/KPTS/PK.240/B/12/2017 dalam hal ini bertindak sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang didalamnya berisi mengenai tujuan, mekanisme dan juga petunjuk pelaksanaan maupun teknis terkait AUTS/K agar usaha ternak berjalan lancar dan baik. Seperti contoh, di dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa risiko yang dijamin dan mendapat pertanggung jawaban AUTS/K adalah: (a) sapi mati karena penyakit, (b) sapi mati karena kecelakaan, (c) sapi mati karena beranak, (d) sapi hilang karena kecurian.

Untuk pembayaran premi asuransi, para peternak hanya diwajibkan membayar 20% dari nilai premi yang ada dan 80% sisanya didapat melalui subsidi pemerintah. Nilai premi asuransi yang seharusnya dibayarkan oleh peternak adalah sebesar Rp. 200.000,- per ekor/tahun, tetapi karena ada subsidi dari pemerintah sebesar 80% atau senilai Rp. 160.000,-, maka peternak hanya dibebankan biaya premi sebesar Rp. 40.000,- per ekor/tahun. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang dilakukan pemerintah tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terutama dalam pasal 7 bagian Pemberdayaan Petani ayat (e) yaitu penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan, dan juga bagian Perlindungan Petani ayat (e) yaitu ganti rugi gagal panen akibat luar biasa. Jadi AUTS/K ini hadir sebagai jawaban untuk mengatasi masalah tidak adanya jaminan dari pemerintah terkait perlindungan usaha peternak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang.

Kementerian Pertanian sebagai stakeholder pusat mengakui jika pihaknya masih belum optimal untuk melakukan sosialisasi tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. <http://agribisnis.co.id/kementan-akui-kurang-maksimal-sosialisasi-asuransi-ternak/>. Dampaknya yaitu adalah tidak terpenuhinya target peserta asuransi AUTS/K itu sendiri dari 120.000 peserta yang ditargetkan namun realisasinya hanyalah 39.219 ekor sapi. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Pending Dadih Permana juga menambahkan bahwa pihaknya memang harus lebih masif dalam melakukan sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau kepada para peternak agar kesadaran peternak dapat meningkat untuk mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. <http://industri.bisnis.com/read/20170619/99/664125/pemerintah-akui-kurang-sosialisasi-asuransi-ternak>

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Menurut Wakil Tim Ahli Master Plan Kawasan Peternakan dari Universitas Brawijaya, Dr. Ir. Sucik Maylinda MS, saat ini sektor peternakan termasuk kedalam sektor andalan dan tumpuan untuk percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Jawa Timur. <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/10/jawa-timur-jadi-andalan-peternakan-nasional>.

Dengan banyaknya populasi dari beragam daerah tersebut khususnya Jawa Timur, maka Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi di bidang peternakan. Dengan populasi yang banyak menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pemasok daging sapi potong terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2016 misalnya, populasi sapi potong pada provinsi Jawa Timur mencapai 32% dari populasi nasional. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1016>

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi tempat produksi sapi potong. Pemilihan Kabupaten Lamongan sebagai contoh studi kasus dikarenakan Kabupaten Lamongan memiliki ketersediaan lahan yang luas sehingga ketersediaan pakan ternak dapat dipenuhi. Selain itu Kabupaten Lamongan dipilih karena capaian keberhasilan Lamongan dalam melaksanakan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di daerahnya. Itu dibuktikan dengan banyaknya kuantitas peternak yang mengikuti program asuransi tersebut hingga mencapai 1.141 ekor ternak pada tahun 2016. (Data laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2016) Kabupaten Lamongan juga memiliki populasi cukup banyak mencapai 104.779 ekor pada tahun 2016. Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai dinas yang menaungi masalah peternakan di Lamongan, juga mendapat penghargaan sebagai pemenang Second Best Achievement “Adi Praja Satwa Sewaka”. <https://lamongankab.go.id/dpkh/2017/05/29/second-best-achievement-adi-praja-satwa-sewaka/> Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah di kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan peternakan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa kabupaten Lamongan menjadi kabupaten yang memang serius dalam membangun peternakan di Indonesia.

Selain itu peneliti juga memilih Kabupaten Tuban sebagai salah satu contoh studi kasus dalam penelitian ini. Kabupaten Tuban dipilih karena jumlah populasi sapi potong di Tuban merupakan terbanyak kedua di Provinsi Jawa Timur dengan total populasi mencapai 329.272 ekor pada tahun 2016. <http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/datastatik/statistikproduksi> Banyaknya populasi sapi potong di Tuban menandakan Kabupaten Tuban sebagai salah satu daerah yang potensial dalam pengembangan peternakan terutama ternak jenis sapi potong.

Namun biarpun Kabupaten Tuban menjadi daerah dengan populasi sapi potong terbanyak kedua di Jawa Timur serta jumlah produksi yang cukup banyak, tak pula diikuti dengan keberhasilan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau/Kerbau di daerahnya. Ini terlihat dengan minimnya antusias peternak yang mengikuti asuransi peternak dengan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang terlihat dari minimnya jumlah partisipan yang mengikuti asuransi tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan pada tahun 2016

jumlah sapi potong yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau tidak mencapai 1% dari keseluruhan populasi sapi potong di Kabupaten Tuban. <https://www.jpnn.com/news/asuransi-ternak-sapi-jauh-dari-harapan> Minimnya antusiasme masyarakat terhadap program AUTS/K menjadi tolak ukur bahwa program AUTS/K masih belum berhasil dilaksanakan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan beberapa fakta diatas perlu kiranya dilakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 12/KPTS/PK.240/B/04/2017. Alasan pentingnya penelitian ini adalah dengan evaluasi, karena kebijakan yang ada pada nyatanya belum mendapat hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Lalu pada evaluasi ini juga akan diketahui sejauh mana program kebijakan tersebut sudah dijalankan sehingga pada akhirnya akan diperoleh rekomendasi kebijakan yang sesuai dan apakah kebijakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan kebijakan harus dihentikan.

Peneliti memfokuskan penelitian pada evaluasi pelaksanaan program karena merupakan suatu hal yang penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program, dan apakah fakta-fakta di lapangan menunjukkan kesesuaian berjalannya program dengan yang direncanakan sebelumnya sehingga pada nantinya akan diketahui proses-proses yang terjadi dari pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini. Oleh karena hal itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan dan juga Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Alasan pemilihan fokus lokasi penelitian tersebut adalah adanya fakta unik yang menjadi menarik untuk diteliti yang terdapat di kedua daerah tersebut yaitu adanya gap antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Tuban. Kabupaten Lamongan dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaan program AUTS/K dibuktikan dengan tingginya antusias dari peternak yang mengikuti program tersebut sedangkan Kabupaten Tuban dinilai masih belum maksimal dalam pelaksanaan AUTS/K di daerahnya dikarenakan minimnya antusias peternak yang mengikuti program tersebut. Untuk itu peneliti akan melakukan evaluasi dan ingin memberikan perbandingan pelaksanaan yang terjadi antara dua daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 di Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban?”.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam hal penelitian dan terutama dalam penerapan ilmu khususnya evaluasi kebijakan publik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan yang dapat memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dijadikan rujukan oleh peneliti, terutama dengan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait yang ikut menyelenggarakan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban yaitu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku pelaksana program di Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban sebagai pelaksana program di Kabupaten Tuban, dan juga PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai mitra pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas asuransi. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan rujukan atau masukan khususnya bagi dinas maupun stakeholder lain yang terkait.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait manajemen kinerja satgas penakib, dan dilanjutkan dengan snowball. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data.

#### Kerangka Teori Kebijakan Publik

Menurut James Anderson kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian. (Agustino,2012:8)

Lebih lanjut terdapat juga definisi yang lebih singkat namun memiliki makna yang cukup luas mengenai kebijakan publik. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan (Nugroho,2003:54-55). Senada dengan

hal tersebut Thomas R. Dye juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi lain diungkapkan oleh Richard Rose yang menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”(Agustino,2012:7).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari kebijakan publik adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu terutama yang berkaitan dengan permasalahan dan kepentingan umum dan juga secara jelas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai penyediaan fasilitasi asuransi pertanian yaitu Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/KPTS/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

#### Tahapan Kebijakan Publik

William Dunn menjelaskan tahapan kebijakan publik sebagai berikut: (Dunn,2003:24-28)

##### 1. Tahap penyusunan agenda (Agenda Setting)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada juga karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

##### 2. Tahap formulasi kebijakan (Policy Formulation)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahapan ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk dapat mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

##### 3. Tahap adopsi kebijakan (Policy Adoption)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative,

consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

##### 4. Tahap implementasi kebijakan (Policy Implementation)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementory), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

##### 5. Tahap evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan tahapan kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/KPTS/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Evaluasi tersebut dirasa perlu karena untuk menilai sejauh mana kinerja Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/KPTS/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau termasuk bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

#### Definisi Evaluasi

Menurut Mustofadjaja, evaluasi sendiri dimaknai sebagai kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrument kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan sebagainya.” (Widodo,2007:11).Sedangkan menurut William N. Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment) (Nugroho,2003:185). Evaluasi

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

#### Jenis Evaluasi

Namun konsep “evaluasi” sendiri selalu terikat konsep “kinerja” sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”. Pembedaan ini penting untuk dipisahkan dengan “analisis” sebagaimana yang telah diuraikan oleh Riant Nugroho berikut ini (Nugroho,2003:187):

##### 1. Evaluasi formulasi kebijakan

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

- Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan yang berlainan;
- Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya;
- Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan; dan
- Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu juga kepada model formulasi kebijakan publik apa yang digunakan. Model formulasi yang dipilih merupakan ukuran yang standar dan dapat juga digunakan untuk menilai proses formulasi.

##### 2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan

Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada domain ini. Hal ini bisa dipahami, karena memang implementasi merupakan faktor yang penting dari suatu kebijakan dan harus dilihat secara benar. Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi kebijakan publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
- Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memiliki variabel-variabel yang dapat diubah atau actionable variable-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

### 3. Evaluasi lingkungan kebijakan publik

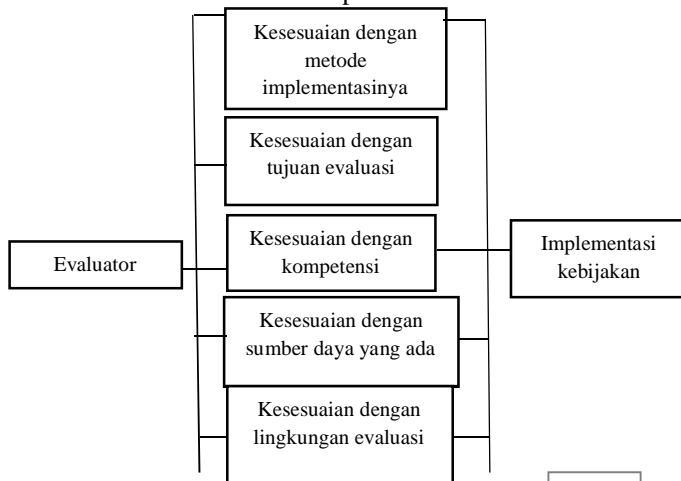
Jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apapun pengaruh lingkungan, ia merupakan faktor yang berada diluar kendali kebijakan publik. Oleh karena itu, lingkungan seringkali “dikeluarkan” dari evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya namun dukungan lingkungan.

Dalam penelitian kali ini, yang menjadi fokus dalam tahapan evaluasi adalah evaluasi pelaksanaan. Hal tersebut karena kebijakan tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yakni Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/KPTS/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau masih dalam tahapan pelaksanaan. Penelitian kali ini ingin menilai dan mengukur sejauh mana kinerja pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Penilaian dan pengukuran atas pelaksanaan program kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan variasi dan indikator-indikator tentang pencapaian program AUTS/K, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan tersebut. Dari informasi mengenai faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kinerja program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.

#### Model Evaluasi

Matland mengemukakan model evaluasi sebagai petunjuk praktis untuk mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam evaluasi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut (Nugroho,2003:485):

Gambar 1.1  
Model Evaluasi Implementasi Matland



Dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, menurut model evaluasi Matland diatas terdapat lima aspek kesesuaian yang bisa dijadikan acuan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi implementasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kelima aspek kesesuaian tersebut, yaitu:

a. Kesesuaian dengan metode implementasi

Seorang evaluator harus menyesuaikan alat ukurnya dengan model metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap metode implementasi kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan alat ukur bagi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan.

b. Kesesuaian dengan tujuan evaluasi

Evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluator yang dibebankan kepadanya.

c. Kesesuaian dengan kompetensi

Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan metodologis yang dimilikinya. Seorang evaluator dengan kompetensi ekonomi diharapkan tidak melakukan evaluasi politik.

d. Kesesuaian dengan sumber daya

Evaluator harus menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumber daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem, manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada.

e. Kesesuaian dengan lingkungan evaluasi

Evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.

Penentuan aspek-aspek sesuai model evaluasi implementasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan serta menjadi fokus penelitian evaluasi ini yaitu pada proses evaluasi implementasi kebijakan berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/Kpts/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Model kesesuaian yang dianggap paling relevan adalah kesesuaian dengan metode implementasi, kesesuaian dengan tujuan evaluasi, kesesuaian dengan kompetensi dan kesesuaian dengan sumber daya. Aspek kesesuaian dengan metode implementasi melihat kebijakan dari segi rencana pelaksanaan yang dibuat dengan kondisi realitas di lapangan. Lalu untuk aspek kesesuaian dengan tujuan evaluasi adalah melihat keberhasilan ketercapaian pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Lalu untuk aspek kesesuaian dengan kompetensi adalah melihat kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam rangka melaksanakan program AUTS/K. Kemudian untuk kesesuaian sumber daya berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban berkaitan

dengan sumber daya yang dimiliki (dana dan SDM) untuk mencapai tujuan yang mendukung pelaksanaan kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Lalu ada aspek kesesuaian dengan lingkungan evaluasi adalah dengan melihat kesesuaian pelaksanaan program yang akan dievaluasi dengan tempat program tersebut dilaksanakan.

Kriteria Evaluasi

William N. Dunn mengemukakan mengenai beberapa kriteria dalam menilai kinerja kebijakan, yaitu (Dunn,2003:609-611):

Tabel 1.1

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Pengantar Analisis Kebijakan Publik oleh Wiliam Dunn (edisi kedua)

Kriteria yang dianggap relevan adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan kriteria yang berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam evaluasi implementasi kebijakan publik. Lalu pada kriteria efisiensi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yaitu Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki (dana dan SDM) untuk mencapai tujuan yang mendukung terlindungnya usaha peternakan resiko kerugian seperti kematian sapi dan atau kehilangan sapi melalui skema asuransi kepada pihak ketiga yang pemanfaatannya agar peternak tidak bangkrut karena terkena resiko kerugian yang ada.

**Pendekatan Evaluasi**

Untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, William N. Dunn menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik seperti berikut ini (Dunn,2005:612):

Tabel 1.2

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimen sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid	Tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospek

	mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program/kebijakan	n merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	tif Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang percaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut

Pada penelitian ini, pendekatan evaluasi yang relevan digunakan adalah pendekatan evaluasi formal dengan tipe evaluasi retrospektif. karena pada evaluasi proses retrospektif cenderung memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program. Dan program yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

#### Program

Ada beberapa definisi program menurut para ahli, salah satunya Bintoro Tjockroamidjojo. Menurut Bintoro Tjockroamidjojo yang dimaksud dengan program adalah suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu yang spesifik dalam ruang dan waktu yang terbatas yang terdiri dari berbagai proyek-proyek yang saling berhubungan dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas (Tjockroamidjojo,1990:194). Lalu ada Nurcholis yang mendefinisikan program sebagai (Nurcholis,2009:137):

“Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga, atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran.” Lebih lanjut Bintoro Tjockroamidjojo menambahkan mengenai ciri-ciri program yang baik, yaitu (Tjockroamidjojo,1990:194):

- a. Tujuan yang dirumuskan harus jelas
- b. Penentuan peralatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan tidak berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa program adalah bagian dari instrumen kebijakan yang berisi suatu bentuk kegiatan operasional dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan suatu kebijakan mencapai tujuannya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Kesesuaian dengan Metode Implementasi

##### ✚ Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Komponen-komponen sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O Jones sudah terpenuhi dalam program kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dan juga Kabupaten Tuban. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Goals atau sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dari kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dan juga Kabupaten Tuban yakni untuk memberikan perlindungan usaha kepada peternak

melalui skema pertanggungan asuransi untuk mengalihkan resiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan atau kehilangan.

2. Plans atau rencana yang menjadi alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku stakeholder pusat yang dalam peraturannya memiliki wewenang untuk merumuskan dan menyusun program asuransi pertanian. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan juga Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban sebagai pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di tingkat Kabupaten/Kota hanya menjalankan sesuai arahan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian.

3. Dalam kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban tidak memiliki program atau kegiatan khusus. Kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) hanya melakukan kegiatan berupa sosialisasi, dan juga pendataan yang memang sesuai dengan yang tertera dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/ Kpts/PK.240/B/12/2017.

4. Decisions atau keputusan-keputusan yang diambil oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan juga Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban untuk pencapaian tujuan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai dan tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/ Kpts/PK.240/B/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang meliputi sosialisasi, pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi, dan juga pelaksanaan assesmen Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Keputusan Menteri Pertanian tersebut menjadi acuan yang menjadi dasar bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.

5. Efek atau dampak yang terdapat pada kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban yang dapat memberikan perlindungan usaha terhadap para peternak dari segala resiko seperti kematian ternak maupun kehilangan ternaknya, juga dapat terlihat dari pemberian subsidi sebesar 80% yang sangat meringankan peternak dalam membayar premi asuransi

##### Kesesuaian dengan Tujuan Evaluasi

##### Evaluasi Efektivitas Proses Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

##### ✚ Akses

Akses digunakan untuk mengetahui apakah program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk



terlibat dan juga menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok. Di Kabupaten Lamongan layanan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diketahui bahwa akses yang diberikan cukup mudah. Kondisi kelompok sasaran atau para peternak di Kabupaten Lamongan mempunyai keterbatasan yaitu wilayah yang luas dan lokasi antar peternak yang berjauhan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memberikan kemudahan layanan berupa kontak byphone antara peternak dengan petugas dinas. Sementara kalau di Kabupaten Tuban sendiri kemudahan terhadap akses program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) terbilang juga cukup mudah. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban sebagai instansi yang berwenang memberikan program layanan ini memberikan upaya kemudahan untuk akses berupa pengerahan petugas lapangan yang hampir setiap hari berkeliling ke tiap-tiap kecamatan untuk mengecek kondisi peternak.

#### ✚ Cakupan (Coverage)

Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1) menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah dan sebagainya). Idealnya seorang evaluator harus memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (eligible) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target. Di Kabupaten Lamongan sendiri program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah cukup mampu untuk menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program yaitu para peternak-peternak yang berada di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut ditunjukkan dengan baiknya capaian yang dihasilkan yaitu sekitar kurang lebih 1000 ekor ternak yang mengikuti program AUTS/K dan ini membuat Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten/Kota yang capaiannya terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk Kabupaten Tuban kendala di lapangan menunjukkan bahwa mindset dan pengetahuan masyarakat terhadap asuransi atau AUTS/K masih sangatlah rendah, dan juga berakibat pada minat mereka para peternak sangat rendah untuk mengikuti program AUTS/K ini. Dalam hal pelaksanaan ini minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti program AUTS/K haruslah ditangani dan diupayakan agar masyarakat teredukasi dengan baik dan kedepannya kuantitas masyarakat yang mengikuti program AUTS/K ini lebih banyak.

#### ✚ Frekuensi

Frekuensi merupakan aspek yang digunakan untuk menilai seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang diberikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi

layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali. Kondisi pada kedua daerah menunjukkan kondisi yang sama yaitu intensitas layanan program yang diberikan terhadap kelompok sasaran dapat dikategorikan sebagai layanan yang berbasis pada kebutuhan si peternak terhadap program ini. Sering tidaknya mereka menggunakan tergantung pada kebutuhan mereka sebagai pengguna layanan, namun sejauh ini pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban selalu siap jika memang para peternak butuh pelayanan seperti pengurusan pendaftaran AUTS/K, pembayaran premi maupun sekedar bertanya informasi tentang AUTS/K.

#### ✚ Bias

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor itu bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak berhak (eligible) untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Kondisi di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah sesuai dan tepat sasaran karena banyaknya peternak utamanya peternak kecil yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini. Di Kabupaten Tuban sendiri menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) bisa dikatakan masih belum sesuai karena adanya bias (menyimpang) dari kelompok sasaran yang seharusnya.

#### ✚ Ketepatan Layanan (Service Delivery)

Ketepatan layanan (service delivery) merupakan aspek yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Aspek ini merupakan aspek yang penting untuk bisa menilai apakah output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan dalam mencapai tujuan program tersebut. Di Kabupaten Lamongan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah berjalan tepat waktu dan juga sesuai dengan peraturan yang ada seperti pengurusan pendaftaran menjadi peserta asuransi, pembayaran premi, dan juga pengajuan klaim. Sementara untuk Kabupaten Tuban kondisi ketepatan layanan sudah dikategorikan cukup baik dikarenakan pelayanan yang diberikan juga sudah tepat waktu dan juga sesuai peraturan yang ada. Namun untuk pengajuan klaim masih belum bisa mendapat jawaban jelas dan masih dikategorikan belum tepat dikarenakan

peternak yang mengikuti AUTS/K di Kabupaten Tuban belum pernah ada yang mengajukan klaim.

#### 🚩 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah aspek yang digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu untuk diajukan adalah terkait pemenuhan hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. Di Kabupaten Lamongan, pemenuhan hak-hak terhadap kelompok sasaran program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dianggap sudah sesuai. Bentuknya adalah proses kerja yang jelas dan sesuai peraturan dalam upaya memenuhi tingkat kepuasan masyarakat seperti pendampingan saat proses asesmen dan juga adanya respon yang baik saat terjadi keluhan. Selain itu dalam pemberian klaim selama ini juga tidak pernah ada masalah seperti jumlah uang ganti rugi klaim yang diberikan maupun waktu pembayarannya. Untuk Kabupaten Tuban, pemenuhan hak-hak terhadap kelompok sasaran dianggap belum maksimal. Meskipun kinerja dinas sudah berupaya maksimal dan juga sesuai aturan yang ada namun belum maksimal dikarenakan pemenuhan hak kelompok sasaran berupa pemberian bantuan klaim belum dilakukan karena memang peternak di Kabupaten Tuban belum pernah ada yang mengajukan klaim.

#### 🚩 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Di Kabupaten Lamongan, program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melihat jumlah sapi yang banyak dan juga jumlah peternak-peternak yang juga didominasi peternak kecil yang membuat program ini sangat dibutuhkan. Sementara untuk di Kabupaten Tuban program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena jumlah sapi potong di Kabupaten Tuban yang jumlahnya melimpah dan juga banyaknya masyarakat yang berusaha di bidang peternakan. Namun masih ada kendala yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini, sehingga masih belum berhasilnya program ini diterapkan.

#### Kesesuaian dengan Kompetensi

##### 🚩 Kompetensi Petugas Pelaksana Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Menurut pendapat Badan Kepegawaian Negara kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun dengan jumlah petugas yang minim namun capaian program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan mampu mencapai hasil yang baik, yaitu dengan tingginya jumlah ternak yang ikut diasuransikan melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Kompetensi yang dimiliki oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai peran yang cukup penting terutama terkait sikap dan perilaku yang dalam hal ini adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan program AUTS/K. Sementara itu untuk kondisi di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, kompetensi petugas pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat dikatakan masih kurang berkompeten. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak tercapainya tujuan program AUTS/K yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban yaitu minimnya jumlah peternak yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

#### Kesesuaian dengan Sumber Daya

##### Evaluasi Efisiensi Proses Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

###### • Input

Masukan (input) merupakan suatu masukan ataupun segala sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan awal suatu program. Dalam penelitian ini input terkait sumber daya manusia.

##### 🚩 Sumber Daya Manusia

Menurut Goggin, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan ketercapaian efisiensi dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sumberdaya manusia terkait program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sebagai pelaksana program menunjukkan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia terutama petugas

lapangan yang ada dari segi kuantitas masih belum mencukupi mengingat kondisi luasnya wilayah dan juga lokasi peternak yang berjauhan, sehingga mengakibatkan mobilisasi antar kecamatan atau desa terhambat karena jumlah petugas yang terbatas. Selain itu juga masalah dana operasional dari daerah yang belum tersedia, padahal pendanaan merupakan hal yang tak kalah penting karena juga berakibat pada kelancaran terlaksananya suatu program atau kebijakan. Sementara di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban kondisi Sumber Daya Manusia yang ada juga dirasa masih kurang dari segi kuantitas dikarenakan luasnya cakupan wilayah di Kabupaten Tuban dan juga lokasi peternak yang tersebar dan juga saling berjauhan. Hal tersebut mengharuskan mobilisasi petugas dinas yang cepat, namun dengan keterbatasan sumberdaya manusia maka hal tersebut sulit tercapai. Selain itu juga belum tersedianya dana operasional yang menunjang petugas dalam melaksanakan program AUTS/K masih belum tersedia, sehingga selama ini masih mengandalkan swadaya dana dari dinas ataupun swadaya dari para petugas sendiri.

- Output

Keluaran (output) merupakan suatu hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini output dinilai dari laporan implementasi program.

- Laporan Pelaksanaan Program

Laporan terkait implementasi program dapat memberikan informasi yang sesuai mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pelaksanaan suatu program. Menurut Domitrovich & Greenberg "when researchers can accurately describe both program processes and outcomes, which they can if implementation data is gathered, it makes it easier to identify and disseminate information about programs that work." Menurut Domitrovich & Greenberg tersebut menyebutkan bahwa ketika peneliti secara akurat dapat menggambarkan kedua proses dan hasil program, yang mereka dapat jika data pelaksanaan dikumpulkan, itu membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menyebarkan informasi tentang program-program yang bekerja.

Laporan implementasi program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selalu rutin dibuat. Laporan pelaksanaan yang ada terdiri dari jumlah peserta yang mengikuti program AUTS/K, jumlah pembayaran yang dilakukan sampai jumlah klaim yang ada. Nantinya hasil laporan tersebut akan dikoordinasikan dan dikirim ke Dinas Peternakan Provinsi kemudian akan diteruskan lagi ke Kementerian Pertanian sebagai koordinator pusat. Selain itu untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, laporan implementasi program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau juga rutin dibuat, yaitu setiap setahun sekali dan nantinya hasil laporan

tersebut akan dikirim ke Dinas Peternakan Provinsi untuk diteruskan lagi ke Kementerian Pertanian.

#### Kesesuaian dengan Lingkungan Evaluasi

- Lingkungan Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu harus menyesuaikan lingkungan dimana program tersebut diimplementasikan. Dengan adanya kesesuaian antara program dengan lingkungannya, maka akan mendukung usaha dalam pencapaian tujuan program tersebut secara efektif. Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dalam pelaksanaannya juga harus menyesuaikan dengan lingkungan program tersebut. Pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dikatakan sesuai karena di Kabupaten Lamongan terdapat populasi sapi potong yang melimpah dan juga kondisi masyarakat di Kabupaten Lamongan yang mayoritas masih mengandalkan usaha di bidang peternakan. Selanjutnya untuk kondisi di Kabupaten Tuban, pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) juga dikatakan sesuai dengan lingkungan pelaksanaannya, karena kondisi masyarakat di Kabupaten Tuban yang sebagian besar masih mengandalkan usaha di bidang peternakan dan juga ditunjukkan dengan tingginya populasi sapi potong yang ada di Kabupaten Tuban.

#### KESIMPULAN

##### 1. Kesesuaian dengan Metode Implementasi

Untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku Dinas yang membidangi program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan terdapat kesesuaian antara rencana pelaksanaan dengan implementasinya berdasarkan aspek sosialisasi, pendataan, dan pelaksanaan assesmen yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

##### 2. Kesesuaian dengan Tujuan Evaluasi

Untuk Kabupaten Lamongan kesesuaian program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dikatakan cukup sesuai dengan tujuan evaluasi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketujuh aspek mengenai efektivitas terdapat 6 aspek yang dikatakan cukup efektif dan sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Akses, karena program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan aksesnya cukup mudah.
- b. Frekuensi, intensitas mengenai pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan kepada kelompok sasaran dapat dikatakan baik.

- c. Bias, Pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah sesuai dan tepat sasaran.
- d. Ketepatan Layanan (Service Delivery), karena di Kabupaten Lamongan pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah berjalan tepat waktu dan juga sesuai dengan peraturan yang ada seperti pengurusan pendaftaran menjadi peserta asuransi, pembayaran premi, dan juga pengajuan klaim.
- e. Akuntabilitas, karena pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan sudah cukup maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan, karena program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lamongan, apalagi melihat jumlah sapi yang banyak dan juga jumlah peternak-peternak yang juga didominasi peternak kecil yang membuat program ini sangat dibutuhkan.

Selanjutnya di Kabupaten Lamongan ada 1 aspek yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Cakupan, karena dalam pelaksanaan program ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utamanya yaitu kurangnya edukasi masyarakat tentang AUTS/K yang rendah sehingga mengakibatkan minat masyarakat untuk mengikuti program AUTS/K juga ikut rendah.

Di Kabupaten Lamongan dari ketujuh aspek kinerja pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tersebut diatas terdapat enam aspek yang dinilai cukup efektif dan salah satunya dinilai tidak efektif. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan secara umum dikatakan efektif dan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

### 3. Kesesuaian dengan Kompetensi

Untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, kompetensi petugas pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sudah dianggap berkompeten. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya tujuan program AUTS/K di Kabupaten Tuban, yaitu banyaknya jumlah masyarakat yang mengikuti program AUTS/K. Hal tersebut dikarenakan pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh petugas dinas kepada masyarakat dirasa sudah cukup baik.

### 4. Kesesuaian dengan Sumber Daya

Untuk Kabupaten Lamongan, kesesuaian program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan Sumber Daya dikatakan belum sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan masih

belum memadai. Selain itu juga masalah dana operasional dari daerah yang tidak tersedia, padahal pendanaan merupakan hal yang tidak kalah penting karena juga berakibat pada kelancaran terlaksananya suatu program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini.

### 5. Kesesuaian dengan Lingkungan Evaluasi

Pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan dikatakan sesuai karena di Kabupaten Lamongan terdapat populasi sapi potong yang tinggi dan juga kondisi masyarakat di Kabupaten Lamongan yang mayoritas masih mengandalkan usaha di bidang peternakan.

Sedangkan proses pelaksanaan program AUTS/K di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban dikategorikan belum berhasil karena tidak tercapainya output yang sesuai dengan tujuan program ditunjukkan dengan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kesesuaian dengan Metode Implementasi

Untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban selaku Dinas yang membidangi program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban dapat dikatakan terdapat kesesuaian antara rencana pelaksanaan dengan implementasinya berdasarkan aspek sosialisasi, pendataan, dan pelaksanaan assesmen yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 2. Kesesuaian dengan Tujuan Evaluasi

Untuk Kabupaten Tuban kesesuaian program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan tujuan evaluasi dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut dapat terlihat dari ketujuh aspek mengenai efektivitas hanya terdapat tiga aspek yang dikatakan cukup efektif dan sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Akses, karena pada program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban kemudahan terhadap akses program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) terbilang cukup mudah.
- b. Frekuensi, intensitas mengenai pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban kepada kelompok sasaran dapat dikatakan baik.
- c. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan, karena untuk di Kabupaten Tuban program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Hal tersebut dikarenakan jumlah sapi potong di Kabupaten Tuban yang jumlahnya melimpah dan juga banyaknya masyarakat yang berusaha di bidang peternakan.

Selanjutnya di Kabupaten Tuban terdapat 4 aspek yang dikatakan tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Cakupan (Coverage), karena dalam pelaksanaannya program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban masih mengalami permasalahan. Capaian program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban masih sangat jauh dari harapan.

b. Bias, karena dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban masih belum sesuai dikarenakan adanya bias (menyimpang) dari kelompok sasaran yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya filterisasi terhadap peternak yang ingin mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

c. Ketepatan Layanan (Service Delivery), karena kondisi ketepatan layanan dikategorikan masih belum sesuai dikarenakan untuk pengajuan klaim dan juga penerbitan surat untuk klaim masih belum bisa mendapatkan hasil yang sesuai dan masih dikategorikan belum tepat dikarenakan peternak yang mengikuti AUTS/K di Kabupaten Tuban belum pernah ada yang mengajukan klaim.

f. Akuntabilitas, karena di Kabupaten Tuban untuk pemenuhan hak-hak terkait program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) terhadap kelompok sasaran dianggap belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak kelompok sasaran berupa pemberian bantuan klaim belum dilakukan karena memang peternak di Kabupaten Tuban belum pernah ada yang mengajukan klaim.

Untuk Kabupaten Tuban, dari ketujuh aspek kinerja pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, hanya ada tiga aspek yang dinilai cukup efektif dan keempat lainnya dinilai tidak efektif. Dari adanya hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban belum efektif dan secara umum masih belum sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

### 3. Kesesuaian dengan Kompetensi

Untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, kompetensi petugas pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) masih dianggap kurang berkompeten. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan program AUTS/K di Kabupaten Tuban, yaitu minimnya jumlah masyarakat yang mengikuti program AUTS/K. Hal tersebut dikarenakan pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh petugas dinas kepada masyarakat yang kurang sesuai.

### 4. Kesesuaian dengan Sumber Daya

Untuk Kabupaten Tuban, kesesuaian Sumber Daya terkait program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dikatakan belum sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban masih belum memadai. Selain itu juga masalah dana operasional dari daerah yang tidak tersedia, padahal pendanaan merupakan hal yang tidak kalah penting karena juga berakibat pada

kelancaran terlaksananya suatu program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini.

### 5. Kesesuaian dengan Lingkungan Evaluasi

Di Kabupaten Tuban, pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) juga dikatakan sesuai dengan lingkungan pelaksanaannya, karena kondisi masyarakat di Kabupaten Tuban yang sebagian besar masih mengandalkan usaha di bidang peternakan dan juga ditunjukkan dengan tingginya populasi sapi potong yang ada di Kabupaten Tuban.

### SARAN

Untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

1. Terkait kesesuaian dengan tujuan evaluasi, dilihat dari efektivitas proses pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan, yaitu seharusnya perlu diadakannya sosialisasi secara lebih masif dan menyeluruh kepada masyarakat di setiap desa dan juga kecamatan seputar kebermanfaatannya mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS/K). Selain itu dalam sosialisasi tersebut perlu juga adanya edukasi dan juga pemberian pemahaman terhadap peternak-peternak yang ada di setiap desa di Kabupaten Lamongan supaya minat peternak terhadap program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) meningkat dan jumlah peternak yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) juga bertambah.

2. Terkait kesesuaian dengan sumber daya, dilihat dari efisiensi proses pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Lamongan, yaitu seharusnya diadakan penambahan petugas terutama petugas lapangan untuk program AUTS/K. Hal tersebut dilakukan agar jumlah petugas yang ada bisa sesuai dengan luas wilayah dan juga persebaran peternak di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan. Selain itu perlu juga adanya peraturan yang dibuat guna mengatur pemberian dana operasional bagi petugas dinas dalam menjalankan tugasnya terkait program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), sehingga para petugas dinas akan maksimal dalam menjalankan tugasnya karena tidak terbebani masalah dana.

Untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban

1. Terkait kesesuaian dengan tujuan evaluasi, dilihat dari efektivitas proses pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban, yaitu perlu diadakannya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat di setiap daerah baik desa dan kecamatan di Kabupaten Tuban, sehingga masyarakat mengetahui kebermanfaatannya program ini secara lebih baik dan nantinya semakin banyak peternak yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban. Selanjutnya perlu juga dilaksanakan proses verifikasi

yang lebih ketat dan sesuai kepada calon peternak yang ingin mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) agar peternak yang mengikuti program AUTS/K ini benar-benar sesuai dengan target sasaran program. Selain itu perlu juga adanya penyaluran bantuan berupa pemberian dana klaim secara lebih baik dan sesuai sasaran, supaya bantuan dari pemerintah dengan adanya program ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program yaitu masyarakat kecil.

2. Terkait kesesuaian dengan kompetensi, dilihat dari minimnya kompetensi petugas pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan tentang program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) untuk para petugas pelaksana yang ada agar dalam pelaksanaan program AUTS/K dan dalam pendekatannya dengan masyarakat bisa memperoleh hasil yang maksimal.

3. Terkait kesesuaian dengan sumber daya, dilihat dari efisiensi proses pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban, yaitu perlu adanya penambahan pegawai terutama petugas lapangan yang melaksanakan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tuban. Hal tersebut mengingat luasnya cakupan wilayah dan juga peta persebaran peternak yang menyebar di desa-desa sehingga perlu diseimbangkan dengan jumlah petugas lapangan yang memadai dan sesuai dengan wilayah yang ada. Selain itu perlu juga dibuat aturan tambahan terkait pemberian dana operasional bagi petugas dinas dalam menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) agar petugas tidak merasa terbebani dalam melaksanakan tugasnya karena tidak adanya dana operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Agustino, Leo, 2012, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Arikunto dan Jabar, 2008, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi, 2010, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara

Cresswell, John W., 2013, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Erwan dan Dyah, 2012, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Hadi, Samsul, 2011, Metode Riset Evaluasi, Jakarta: Laksbang Mediatama

Idrus, Muhammad, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua), Jakarta: Penerbit Erlangga

Manullang, Marihot, 2012, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhadjir, Noeng, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin

Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Gramedia

Nurcholis, Hanif, 2009, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Jakarta: Grasindo

Parson, Wayne, 2005, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik, Jakarta: Perenada Media

Patton, Michael Quinn, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setyodarmodjo, Soenarko, 2003, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Surabaya: Airlangga University Press

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta

Syamsi, Ibnu, 2004, Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja, Jakarta: PT Bumi Aksara

Tjockroamidjojo, Bintoro, 1990, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: CV Masagung

Tohirin, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Depok: PT. Rajagrafindo

Triana, Rochyati Wahyuni, 2011, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik, Surabaya: Revka Surabaya

Wahab, Abdul, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko, 2007, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Jakarta: Media Pressindo

\_\_\_\_\_, 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: Caps

### Jurnal:

S, Wahyuni, 2007, Kelayakan pengembangan asuransi usahaternak sapi potong pendukung agribisnis pedesaan di wilayah marginal dalam: Makalah Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII, Bogor: Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmiasi, 2015, Asuransi Pertanian Sebagai Alternatif Mengatasi Risiko Usaha Tani Menuju Pertanian

Berkelanjutan: Tinjauan Konseptual, Jurnal Pascasarjana Institut Pertanian Bogor  
Web:

Antisipasi Resiko Mati, Peternak Lamongan Dikenalkan Asuransi, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/10/antisipasi-resiko-mati-peternak-lamongan-dikenalkan-asuransi> (diakses tanggal 21 Februari 2018)

Ini Strategi Jawa Timur Memperkuat Industri Peternakan Sapi, <http://kabar24.bisnis.com/read/20150611/78/442480/ini-strategi-jawa-timur-memperkuat-industri-peternakan-sapi> (diakses tanggal 19 Februari 2018)

Asuransi Usaha Tanam Padi dan Ternak Sapi Tak Capai Target, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/asuransi-usaha-tanam-padi-dan-ternak-sapi-tak-capai-target> (diakses tanggal 21 Februari 2018)

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Jauh Dari Harapan, <https://www.jpnn.com/news/asuransi-ternak-sapi-jauh-dari-harapan> (diakses tanggal 20 Februari 2018)

Jawa Timur Jadi Andalan Peternakan Nasional, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/10/jawa-timur-jadi-andalan-peternakan-nasional> (diakses tanggal 19 Februari 2018)

Jumlah populasi Sapi Potong Indonesia menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2016, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/931/populasi-sapi-potong-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2009---2016-.html> (diakses tanggal 8 Maret 2018)

Jumlah populasi Sapi Potong Indonesia menurut Provinsi tahun 2011-2016, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1016> (diakses tanggal 15 Februari 2018)

Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20persiapan%20implementasi%20asuransi%20pertanian.pdf> (diakses 20 Februari 2018)

Kementan Akui Kurang Maksimal Sosialisasi Asuransi Ternak, <http://agribisnis.co.id/kementan-akui-kurang-maksimal-sosialisasi-asuransi-ternak/> (diakses tanggal 7 Maret 2018)

Pemerintah Akui Kurang Sosialisasi Asuransi Ternak, <http://industri.bisnis.com/read/20170619/99/664125/pemerintah-akui-kurang-sosialisasi-asuransi-ternak> (diakses tanggal 7 Maret 2018)

Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usaha Tani” <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/1539/file/Asuransi-Pertanian-Lindung.pdf> (diakses tanggal 20 Februari 2018)

Pentingnya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau,

<http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/1164/pentingnya-asuransi-usaha-ternak-sapi-aufs> (diakses tanggal 22 Februari 2018)

Peternak Keluhkan Tak Meratanya Program Asuransi Sapi Tulungagung, <http://surabaya.bisnis.com/read/20170126/10/93686/peternak-keluhkan-tak-meratanya-program-asuransi-sapi-tulungagung> (diakses tanggal 8 Maret 2018)

Peternak Sapi Bisa Nikmati Asuransi Ternak Subsidi Pemerintah, <http://disnak.jatimprov.go.id/web/beritautama/read/1208/peternak-sapi-bisa-nikmati-asuransi-ternak-subsidi-pemerintah> (diakses tanggal 20 Februari 2018)

Produksi Daging Ternak di Kabupaten Lamongan, <http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/datastatistik/statistikproduksi> (diakses tanggal 20 Maret 2018)

Produksi Daging Ternak di Kabupaten Tuban, <http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/datastatistik/statistikproduksi> (diakses tanggal 25 Maret 2018)

Skema Koordinasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, <http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Pedoman%20AUTS%202017.pdf> (diakses tanggal 19 Februari 2018)

Upaya Kementerian Pertanian Wujudkan Ketahanan Pangan dari Ternak, <https://nasional.tempo.co/read/884060/upaya-kementerian-pertanian-wujudkan-ketahanan-pangan-dari-ternak> (diakses tanggal 18 Februari 2018)

#### Dokumen:

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 18/Kpts/PK.240/B/12/2017 Tentang Pedoman Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani